



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Nasib Mess Pemda Tunggu Konsultasi

BENGKULU - Kondisi Mess Pemda Provinsi Bengkulu sangat memprihatinkan. Gedung yang dibangun tahun 2007 hingga menguras APBD Provinsi Bengkulu sebesar Rp 53 miliar itu, sampai saat ini belum juga dimanfaatkan. Rencana untuk menyerahkan pengelolaannya pada pihak ketiga, hingga kini belum juga terealisasi.

Padahal, sejumlah kerusakan mulai terlihat dari gedung yang berada di pinggir Pantai Tapak Paderi itu. Sementara, rencana Pemprov Bengkulu untuk melelang pengelolaan gedung ini untuk yang kedua kalinya, belum diketahui kapan waktu pastinya.

Padahal, beberapa bagian gedung ini sudah mulai mengalami kerusakan.

Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Hj. Yuliswani, SE saat dikonfirmasi, menilai adanya sedikit kerusakan pada gedung Mess Pemda itu dinilai wajar. "Karena ini kan sudah lama waktunya. Tentu sudah banyak yang berubah, ini juga mempengaruhi perubahan nilai aset gedung dan tanahnya," ujar Yuliswani.

Namun ia menegaskan, belum adanya investor yang tertarik untuk mengelola bukan karena kondisi fisik bangunan, namun karena saat lelang belum dibuka atau dimulai. "Kita kan belum membuka lelang, sehingga kita belum tahu orang tertarik atau tidak. Mengenai apakah akan dilelang lagi atau tidak, nanti kita rapatkan dulu mana yang terbaiknya. Tunggu hasil

konsultasi teman-teman dari aset," kata Yuliswani.

Sekarang, sambung Yuliswani tim dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu sedang konsultasi dengan Kemendagri, tentang rencana pemanfaatan mess pemda itu termasuk lahan-lahan di sekitarnya. "Sembari menunggu hasil konsultasi, kita tetap melakukan komunikasi kepada pihak-pihak calon investor yang berminat, walaupun lelang belum dibuka," jelas Yuliswani.

Sementara itu, Kepala BPKD Provinsi Bengkulu Heru Susanto saat ditanya mengenai Mess Pemda belum mau banyak memberikan keterangan. "Yang jelas saat ini sedang dikaji mengenai kerjasama dan pemanfaatan yang terbaik. Baik lahan maupun bangunan Mess Pemda tersebut," ujarnya.

Mengenai pelaksanaan

lelang, ia mengatakan menunggu setelah kajian secara aturan terbaru selesai. "Karena aturannya berubah dimulai peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 sampai dengan PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang milik negara (BMN) dan BMD. Lalu dari Permendagri nomor 17 tahun 2007 sampai dengan yang terbaru yakni permendagri 19 tahun 2016," jelas Heru.

Menurut Heru, perlu juga dibentuk gabungan yang melibatkan OPD terkait mengenai tugas pokok dan fungsi untuk pemanfaatan BMD. "Agar kita tidak salah langkah," tukasnya. Kemudian terkait kondisi fisik bangunan yang sebagian sudah ada yang rusak, menurut Heru memang perlu dilakukan pengkajian kembali. "Ya, makanya kita lakukan penilaian kembali oleh KPKNL atau KJPP," tutup Heru. (tew)